

# Politik Mega Pasca-Kiemas

**KONGRES IV** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimulai hari ini (9/4) di Bali dipastikan akan mengukuhkan lagi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum untuk periode 2015-2020.

Mengapa Mega? Selain meneruskan trah Soekarno, Mega memang sudah berhasil mengantarkan PDIP menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Selama berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono (2009-2014), Mega berhasil menyusun kekuatan politik sekaligus melatirkan kader pemimpin nasional (Presiden Joko Widodo/Jokowi) dan lokal seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pasca ditinggal Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas (TK), Mega memang terkesan lebih fokus dan mandiri dalam penentuan haluan gerak politik partai. Bahkan, berkomunikasi politik Mega dengan SBY kembali membuka sepele tinggal TK, suami Mega. Sebab, TK merupakan tokoh penting dalam menjembatani

PDIP dengan pemerintahan SBY (Partai Demokrat) selama kurun waktu sepuluh tahun.

Guyonannya, meskipun di keluarga tetap harmonis, arah politik bisa saja berbeda. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, TK secara terang-terangan tidak mendukung Jokowi sebagai kandidat gubernur, sedangkan Mega mendukung Jokowi. Menurut TK, PDIP harus cerdas dan tegas dengan mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramuli (Toke-Nara) karena mereka dinilai paling tahu kondisi Jakarta. Ini tentu membuat Mega berada dalam pilihan yang sulit.

Jokowi yang waktu itu masih wali kota Solo memberikan opsi kepada PDIP, yaitu maju sebagai calon gubernur DKI atau tidak sama sekali (bukan calon wakil gubernur). Akhirnya Mega tetap meminta Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI.

**Politik Grassroots yang Ternoda**  
Kepemimpinan Mega pasca-Taufiq Kiemas memang cenderung menimbang kalkulasi politik berdasarkan keinginan *grassroots* (akar rumput) ketimbang pola lobi-lobi



O | e | h

## AUGUSTINUS SIMANJUNTAK\*

politik yang bersifat elitis. Mega justru mulai membudayakan pola pencalonan kader berdasar prestasi yang telah dirasakan masyarakat. Sementara Kiemas cenderung menetapkan kalkulasi politik berdasar jumlah kursi di DPR/DPRD sekaligus melakukan manuver dan lobi-lobi politik secara elitis.

Namun, Mega telah membuktikan bahwa pendekatan elitis dalam pilpres/pilkada sudah tidak efektif. Dalam pilkada DKI Jakarta putaran II, Jokowi-Ahok yang hanya diusung PDIP dan Gerindra ternyata berhasil mengalahkan Foke-Nara yang diusung koalisi partai-partai besar

(Demokrat, PAN, Golkar, PPP, PKB, dan PKS). Waktu itu Jokowi-Ahok meraih 53,82 persen suara, sedangkan Foke-Nara 46,18 persen suara. Rakyat memilih tokoh, bukan partai.

Pendekatan *grassroots* itu pula yang terjadi dalam Pilpres 2014. Jokowi-Jusuf Kalla (JK) berhasil meraih 53,15 persen suara atau unggul 6,3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (46,85 persen suara). Angka itu pun terbalik dengan perolehan suara parpol pendukung capres di Pileg 9 April 2014. Jika perolehan

suara parpol pendukung Jokowi-JK (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI) digabung, totalnya hanya 40,88 persen. Sedangkan parpol pendukung Prabowo-Hatta (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB) berjumlah 59,12 persen.

Artinya, Prabowo-Hatta seharusnya unggul sekitar 19 persen. Lagi, rakyat ternyata lebih memilih sosok pemimpin yang *personal brand*-nya kuat ketimbang calon yang dipasangi elite parpol.

Perlu diingat, kemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 tidak lepas dari citra Jokowi di Solo.

Mega dan PDIP menyadari bahwa

semakin kuat citra calon presiden dan kepala daerah di masyarakat, semakin sedikit pula biaya untuk memenangkannya di ajang pilpres maupun pilkada. Pola sukses itu pula yang ikut memperkuat citra PDIP Sayang, citra PDIP dan Jokowi tercoreng oleh upaya pelemahan KPK pasca ditetapkannya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka korupsi Kasus BG, yang juga ajudan Mega semasa menjadi presiden, membuat para pimpinan KPK ramai-ramai dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pimpinan KPK (Abrabain Samad dan Bambang Widjojanto) akhirnya dijadikan tersangka oleh Bareskrim. Akibatnya, sebagian pelapor pejabat KPK atau saksi berasal dari PDIP dan koalisinya seperti Hastu Kristiyanto (Pit Sekjen PDIP), Sugianto Sabran (anggota DPR dari PDIP), dan Zainal Tahir (caleg Nasdem). Tak tertutup kemungkinan kasus pelemahan KPK membuat citra PDIP yang sudah sempat menguap bisa memudar di mata publik.

\* Dosen etika di Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya